



NUEVA ECONOMÍA FORESTAL
PARA LA ACCIÓN CLIMÁTICA:
Desarrollo Territorial e Innovación

LAPORAN

GCF TASK FORCE PERTEMUAN TAHUNAN KE-16 - SESI KERJA EKONOMI HUTAN BARU: BIOEKONOMI, INFRASTRUKTUR ALAM, KOMODITAS BERKELANJUTAN, RESTORASI, DAN KONDISI PENDUKUNG

Pertemuan Tahunan ke-16 GCF Task Force

Laporan Sesi Kerja Ekonomi Hutan Baru¹

Caquetá, Kolombia

Ringkasan Eksekutif	1
1. Membangun Bioekonomi yang Berkembang Pesat	3
2. Melestarikan Infrastruktur Alam	4
a. Kemajuan dalam REDD+ Yurisdiksi.....	4
b. Membangun Mekanisme Pendanaan untuk Perlindungan Iklim dan Hutan: Pengelolaan Bersama dan Desain	8
3. Komoditas Berkelanjutan	10
a. Mengatasi Tantangan Ketertelusuran: Persiapan Implementasi EUDR.....	10
b. Pendekatan Regeneratif: Ternak Sapi, Pertanian, dan Akses ke Pasar.....	15
4. Kondisi Pendukung untuk Ekonomi Hutan Baru	20
a. Mengatasi Pelanggaran Hukum di Bidang Kehutanan: Menangani Akses terhadap Lahan, Tata Kelola yang Lebih Baik, Kolaborasi, dan Teknologi.....	20
b. Menghubungkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK atau NTFP) dari Amazon ke Pasifik	23
5. Pemulihan dan Ketahanan	26
a. Manajemen Kebakaran Terpadu: Dari Amazon hingga California.....	26
b. Restorasi Ekosistem: Studi Kasus, Tantangan, dan Jalur Menuju Skala yang Lebih Besar.....	30
Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya	32

Ringkasan Eksekutif

Pada Pertemuan Tahunan ke-16 Gugus Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan (GCF Task Force) di Caquetá, Kolombia, negara-negara anggota dan provinsi, para pemimpin masyarakat adat dan lokal, pelaku sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil berkumpul untuk bersama-sama membangun mekanisme investasi dan kapasitas Ekonomi Hutan Baru yang terarah di

¹Laporan ini didasarkan pada catatan manusia dan transkripsi serta catatan yang dihasilkan oleh AI. Versi bahasa Indonesia dari laporan ini diterjemahkan dari bahasa Inggris dengan bantuan AI.

seluruh wilayah tropis. Berdasarkan **Rencana Aksi Manaus untuk Ekonomi Hutan Baru** (2022), dan empat blok bangunan yang diuraikan dalam **Cetak Biru untuk Ekonomi Hutan Baru** (2024), sesi kerja diorganisasikan dalam lima tema:

1. Membangun Bioekonomi yang Berkembang Pesat
2. Melestarikan Infrastruktur Alam
3. Pemulihan dan Ketahanan
4. Komoditas Berkelanjutan
5. Kondisi Pendukung untuk Ekonomi Hutan Baru

Sesi-sesi ini dirancang untuk membangun keahlian pemerintah subnasional dalam realitas yurisdiksi mereka dan untuk menghubungkan realitas ini dengan kemitraan baru dan peluang investasi. Jenis interaksi dan proses pembangunan bersama yang bermakna ini tidak pernah lebih penting daripada sekarang. Karena deforestasi tropis terus meningkat, mengancam keberadaan kita, kita membutuhkan solusi ekonomi, sosial, dan tata kelola berbasis hutan yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar lebih dari sebelumnya.

Beberapa hambatan lintas sektoral telah diidentifikasi:

- **Biaya persiapan dan kesiapan yang tinggi** : Hambatan finansial, seperti biaya awal yang tinggi untuk validasi/verifikasi JREDD+ dan kepatuhan Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (European Union Regulation on Deforestation-free Products, EUDR), membatasi peningkatan skala di tingkat subnasional dan keterlibatan petani kecil.
- **Sistem yang terfragmentasi dan data yang tidak selaras** : Kurangnya keselarasan yang terus-menerus di seluruh platform pemantauan dan kerangka kerja tata kelola menciptakan penundaan dan ketidaksesuaian di seluruh sistem.
- **Risiko pengucilan petani kecil** : Proses uji tuntas yang kompleks, biaya sertifikasi yang tinggi, dan kesenjangan infrastruktur digital di daerah pedesaan berisiko mendorong produsen skala kecil keluar dari rantai pasokan formal.
- **Ketidakstabilan politik dan kelembagaan** : Pergantian politik sering mengancam keberlanjutan kebijakan jangka panjang, kepercayaan publik, dan implementasi yang berkelanjutan.

Kemajuan yurisdiksi juga diidentifikasi:

- **Inovasi dalam perangkat yurisdiksi**: Yurisdiksi menerapkan perangkat digital untuk menangani kepatuhan dan ketertelusuran (misalnya, CAR Digital 2.0 dan Paspor Hijau Mato Grosso, Segel Hijau/ Selo Verde Acre, Pusat Pemantauan Komprehensif dan sistem peringatan dini Santa Cruz, dan sistem Guardian Forestal Michoacán).

- **Mekanisme pendanaan inovatif:** Model keuangan strategis bermunculan untuk menyalurkan sumber daya secara langsung kepada aktor dan komunitas lokal, termasuk Amazon Future Fund di Ekuador dan mekanisme regional seperti Agroecology Fund of the Yucatan Peninsula (FAPY).
- **Pergeseran ke produksi berkelanjutan:** Yurisdiksi-yurisdiksi meningkatkan skala pertanian regeneratif dan program komoditas berkelanjutan, memanfaatkan merek lokal (misalnya, daging bebas deforestasi CaLibre dari Jalisco) dan pendorong pasar seperti kesiapan EUDR untuk memformalkan rantai nilai sekaligus meningkatkan akses pasar bagi produsen skala kecil.
- **Pengintegrasian praktik adat dan tradisional:** Pengetahuan dan sistem adat seperti *chagras* di Vaupés, Kolombia, dan produksi tradisional produk hutan non-kayu di Peru diintegrasikan ke dalam kerangka bioekonomi dan restorasi yang lebih luas.

1. Membangun Bioekonomi yang Berkembang Pesat

Dari Perencanaan hingga Implementasi: Strategi Investasi dan Keberlanjutan untuk Mendorong Pembangunan Sosial-Bioekonomi, Bagian 1 & 2

Lihat laporan lengkap sesi bioekonomi di sini:

https://www.gcftf.org/wp-content/uploads/2026/09/16th-AM-working-session-report-bioeconomy_BH.pdf

Sesi bioekonomi berlangsung selama dua hari dan peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas topik-topik berikut:

- Mengapa Pengembangan Bioekonomi Membutuhkan Kepemimpinan Subnasional dan Apa yang Dibutuhkan Para Pemimpin Subnasional untuk Mewujudkannya
 - Kepemimpinan subnasional sangat penting untuk membangun bioekonomi berkelanjutan karena hal itu mendasarkan kebijakan pada realitas teritorial tertentu, memungkinkan prioritas yang efektif terhadap produk-produk strategis dan integrasi infrastruktur dengan kebutuhan konservasi. Mencapai transisi ini membutuhkan para pemimpin untuk mengatasi hambatan keuangan dan mendorong kemitraan multi-pemangku kepentingan yang memberdayakan masyarakat lokal sambil mengukur keberhasilan melalui indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terpadu.
- Menciptakan Kondisi dan Menghubungkan Jalur Investasi yang Layak: Komunitas, Pemerintah, dan Investor

- Menjembatani kesenjangan antara komunitas hutan dan investasi global membutuhkan penciptaan kondisi yang mendukung, seperti kerangka peraturan yang jelas dan tata kelola wilayah yang kuat, di samping peningkatan kapasitas yang terarah untuk usaha lokal. Agenda untuk dua tahun ke depan harus fokus pada mekanisme praktis untuk menghubungkan komunitas dan modal. Ini dapat mencakup bantuan teknis, pembiayaan katalitik, dana persiapan proyek, platform investasi, dan kemitraan dengan aktor yang khusus bergerak di bidang usaha kecil dan rantai nilai.
- **Ekonomi Hutan Komunitas: Memikirkan Kembali Regulasi dan Tata Kelola Penggunaan Lahan**
 - Untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam ekonomi hutan, kerangka peraturan harus disederhanakan melalui reformasi yang fleksibel dan spesifik wilayah yang mengurangi beban prosedural sambil tetap menjaga perlindungan lingkungan yang diperlukan. Lebih lanjut, tata kelola penggunaan lahan yang sukses membutuhkan integrasi pengetahuan tradisional dan masyarakat adat dengan inovasi ilmiah dan kepastian hukum, memastikan bahwa masyarakat lokal dapat terlibat dalam rantai nilai berkelanjutan tanpa mengorbankan hak teritorial atau prioritas budaya mereka.
- **Pusat Regional dan Fasilitas Bioekonomi GCF Task Force: Mengambil Pelajaran dari Pengalaman untuk Merancang Masa Depan**
 - Di Kolombia, prioritasnya adalah mengkonsolidasikan platform fungsional yang menghubungkan para pelaku, mengatasi kesenjangan, mempercepat usaha, mengaktifkan permintaan, dan mengartikulasikan instrumen publik, kerja sama, ilmu pengetahuan, perusahaan, dan organisasi akar rumput.

2. Melestarikan Infrastruktur Alam

a. Kemajuan dalam REDD+ Yurisdiksi

MODERATOR:

- Syahrina D. Anggraini , Direktur GCF Task Force Indonesia
- Carlos Aragon, Direktur Negara Brasil GCF Task Force

PEMBICARA:

- Lucia Madrid, Wakil Direktur, Ketua Tim Perlindungan dan Keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL atau IPLC), Winrock /ART/TREES

- Fermin Chimatani Tayori, anggota Komite MAKL Global GCF Task Force dan Presiden La Asociación Nacional de los Pelaksana Kontrak Administrasi Cadangan Komunitas Peru (ANECAP)
- Florian Reber, SVP, Pengembangan Bisnis dan Kemitraan, Chloris Geospatial
- Sassan Saatchi, CEO, CTrees
- Marcello de Lima Lelis, Sekretaris Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, dan Iklim, Tocantins, Brasil
- Daniel Graf Pérez, Direktur Jenderal Sumber Daya Alam, Jalisco, Meksiko
- Edu Effiom, Direktur Jenderal, Dewan Perubahan Iklim Negara Bagian Cross River, Nigeria
- Andrés Coloma, Direktur Pengelolaan Lingkungan, Pastaza, Ekuador
- Jaksilande Araújo de Lima, Presiden Institut Perubahan Iklim (IMC), Acre, Brasil

PESERTA:

- Mariano Cirone , Spesialis Perlindungan Lingkungan, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP)
- Shannon Dilley, Kepala Penasihat Hukum dan Penghubung Suku, Dewan Sumber Daya Udara California, AS
- Francisca Oliveira de Lima Costa, Sekretaris Khusus Masyarakat Adat - SEPI, Acre, Brazil
- Haerul Arifin Abdullah, KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN, Papua Barat, Indonesia
- Estiko Wiradyo , Kepala Divisi Perencanaan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Papua, Indonesia
- Jimmy Walter Susanto, Kepala Dinas Kehutanan , Papua Barat, Indonesia
- Gustavo Sánchez, anggota Komite MAKL Global GCF Task Force dan Presiden Red MOCAF



Sesi kerja ini berfokus pada mekanisme pembiayaan iklim, implementasi program REDD+ yurisdiksional, persyaratan teknis dan metodologis standar ART TREES, alat pemantauan teknologi, dan kondisi kelembagaan yang diperlukan untuk mengakses pembayaran berbasis hasil.

Standar SENI/POHON

ART/TREES adalah standar yang ketat dan berintegritas tinggi untuk inisiatif JREDD+ yang membutuhkan kemampuan teknis dan kelembagaan yang tinggi. Bagi yurisdiksi yang ingin mencapai standar ART/TREES, empat faktor keberhasilan telah disorot:

- Sekretariat ART S ;
- Partisipasi awal dari aktor lokal, khususnya masyarakat adat dan komunitas lokal;
- Penilaian kapasitas sebelum beralih ke verifikasi; dan
- Persiapan untuk evaluasi independen dengan menyusun dokumentasi yang dapat diverifikasi secara sistematis dan merancang strategi partisipasi.

Teknologi, pemantauan jarak jauh, dan harmonisasi data.

Teknologi pengamatan bumi diakui sebagai alat strategis untuk mengukur deforestasi, degradasi, biomassa, karbon, dan kinerja program. Namun, masih terdapat kurangnya harmonisasi antara data nasional, persyaratan standar, registrasi, dan investor. Tindakan prioritas untuk mengatasi tantangan ini meliputi:

- Mengintegrasikan sensor jarak jauh, rangkaian data historis, dan sistem resmi untuk membangun dasar data yang kuat dan transparan; dan

- Menstandarisasi kriteria di berbagai yurisdiksi, standar, dan investor untuk memfasilitasi uji tuntas dan pengambilan keputusan keuangan.

Pengalaman yurisdiksi

- Peru menghadirkan inisiatif REDD+ berbasis masyarakat adat yang berfokus pada wilayah dengan tutupan hutan tinggi dan deforestasi rendah (HFLD), yang dipimpin oleh organisasi masyarakat adat dan dikoordinasikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup (MINAM).
- Tocantins, Brasil, menunjukkan bagaimana pra-investasi memungkinkan pengembangan intelijen teritorial, konsultasi sosial, dan sistem informasi seperti Pusat Intelijen Geografis untuk Pengelolaan Lingkungan (Centro de Inteligência). Geografi mereka Gestão do Meio Ambiente, CIGMA). <https://cigma.to.gov.br/>
- Jalisco menekankan bahwa REDD+ dapat bermanfaat meskipun volume kreditnya lebih kecil karena REDD+ mengatur kebijakan publik dan memperkuat pengurangan deforestasi dan degradasi.
- Negara Bagian Cross River, Nigeria, menyoroti tantangan koordinasi antara pemerintah federal dan subnasional, serta kebutuhan akan solusi produktif, seperti biochar dan perkebunan yang tumbuh cepat, untuk mengatasi tekanan pada hutan primer.
- Pastaza, Ekuador, menyoroti konservasi berbasis komunitas, tutupan vegetasi asli yang tinggi, dan kolaborasi dengan masyarakat dan kebangsaan di wilayah yang sulit dijangkau.
- Acre mempresentasikan Sistem Insentif Negara untuk Jasa Lingkungan (Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (SISA) sebagai arsitektur terpadu dari tata kelola, pembayaran berdasarkan hasil, pembagian keuntungan, dan partisipasi sosial.

Hambatan

- Biaya tinggi (Jalisco, Meksiko, mencatat bahwa biaya mereka sejauh ini mencapai sekitar \$150.000.)
- JREDD+ membutuhkan jaringan, pembelajaran antar rekan, transparansi, perlindungan yang kuat, dan dukungan teknis berkelanjutan.
- Ada kebutuhan untuk mengurangi informasi yang salah dan meningkatkan komunikasi publik mengenai integritas pendekatan yurisdiksi.
- Partisipasi sosial tidak seharusnya terbatas pada pengesahan dokumen saja, tetapi harus menjadi proses yang terinstitusionalisasi, dianggarkan, dan sesuai dengan budaya setempat.

Tindakan Prioritas untuk Dimajukan

- Konsolidasikan mekanisme keuangan yang memungkinkan untuk mencakup kesiapan, persiapan teknis, konsultasi, dan verifikasi.
- Memperkuat kerangka kelembagaan yang menjamin keberlanjutan di luar perubahan politik dan administratif.
- Rancang mekanisme distribusi manfaat yang transparan, partisipatif, dan sesuai dengan budaya setempat.
- Mengintegrasikan sistem produksi, pengelolaan kebakaran, peternakan berkelanjutan, konservasi, restorasi, dan pemantauan sebagai bagian dari strategi REDD+ yurisdiksional.
- Membentuk komunitas praktik atau kelompok kerja tematik di dalam GCF Task Force untuk pertukaran teknis yang berkelanjutan.
- Kembangkan basis data dengan repositori dokumen, praktik terbaik, templat, contoh, dan pelajaran yang dipetik.
- Jelajahi dana bergulir GCF Task Force untuk mendukung fase persiapan, pendaftaran, validasi, dan verifikasi.
- Memperkuat kemampuan negosiasi dengan sektor swasta dan investor, termasuk kerangka kerja uji tuntas yang jelas.
- Membangun transparansi informasi dan protokol komunikasi untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Ini termasuk mengelola harapan masyarakat secara bertanggung jawab, menghindari janji-janji prematur tentang pendapatan dari kredit karbon.
- Berikan kepada investor metrik kinerja, penyaringan risiko, dan bukti yang dapat diandalkan.

b. Membangun Mekanisme Pendanaan untuk Perlindungan Iklim dan Hutan: Pengelolaan Bersama dan Desain

MODERATOR:

- Jason Gray, Direktur Proyek, GCF Task Force
- Bruno Paladines, Direktur Negara Ekuador, GCF Task Force
- Gustavo Sánchez, anggota Komite MAKL Global GCF Task Force dan Presiden Red MOCAF

PEMBICARA:

- Basilio Velázquez Chi, anggota Komite MAKL Global GCF Task Force dan Dana Agroekologi Semenanjung Yucatan (Fondo Agroecológico Península de Yucatán, FAPY)
- Neyra Silva Rosado, Sekretaris Pembangunan Berkelanjutan, Negara Bagian Yucatán, Meksiko



Sesi kerja ini berfokus pada mekanisme pembiayaan iklim, implementasi program REDD+ yurisdiksional, persyaratan teknis dan metodologis standar ART TREES, alat pemantauan teknologi, dan kondisi kelembagaan yang diperlukan untuk mengakses pembayaran berbasis hasil.

Mekanisme pendanaan regional di Yucatán, Meksiko

Dana Agroekologi Semenanjung Yucatan (Fondo Agroecológico Península de Yucatán, FAPY) bertindak sebagai mekanisme regional yang menerima sumber daya dari para donor dan menyalurkannya kepada organisasi masyarakat, koperasi, organisasi produsen, masyarakat adat, organisasi petani, dan jaringan kolaborasi. FAPY memastikan bahwa masyarakat menerima dana langsung dengan memberikan hibah kecil sebesar \$20-30 ribu untuk produksi agroekologi, peningkatan kapasitas, akses pasar, kemitraan kolaboratif, dan advokasi kebijakan publik.

Dana Masa Depan Amazon (Fondo Futuro Amazónico, FFA)

FFA adalah dana konservasi inovatif yang memberikan kekuasaan yang setara kepada masyarakat adat (Bangsa Shiwiar, Andwa, Sapara, dan Achuar); dan pemerintah provinsi (Morona Santiago, Pastaza, dan Zamora Chinchipe) serta memastikan perlindungan jangka panjang Amazon Ekuador. Dana ini dirancang untuk mendukung: Rencana Kehidupan Masyarakat Adat, rencana pengelolaan konservasi provinsi, dan implementasi REDD+ di seluruh wilayah yurisdiksi GCF Task Force di Ekuador. Struktur perwalian ini bertujuan untuk melindungi sumber daya publik, memanfaatkan kerja sama internasional dan donor swasta, memperkuat

kapasitas pengelolaan, dan memastikan bahwa sumber daya tersebut sampai ke masyarakat dan wilayah. Dana ini juga seimbang gender, dengan partisipasi dari prefektur, suku-suku adat, dan organisasi konstituen.

Mekanisme keuangan alternatif untuk pendanaan langsung

Inisiatif Hak Tanah Komunitas dan Pembiayaan Konservasi (CLARIFI), sebuah inisiatif dari Inisiatif Hak dan Sumber Daya serta Kampanye untuk Alam, memobilisasi dana publik dan swasta yang fleksibel secara langsung kepada masyarakat adat, komunitas keturunan Afrika, dan komunitas lokal. CLARIFI juga mendukung Dana Teritorial Mesoamerika, sebuah mekanisme keuangan alternatif yang dirancang oleh Aliansi Masyarakat dan Hutan Mesoamerika (Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, AMPB), oleh dan untuk Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL). Sebuah bank mikro kehutanan di Puebla didirikan untuk mengurangi ketergantungan pada donasi dan membangun literasi keuangan masyarakat.

3. Komoditas Berkelanjutan

a. Mengatasi Tantangan Ketertelusuran: Persiapan Implementasi EUDR

MODERATOR:

- Rosa Maria Vidal, Penasihat Senior, GCF Task Force Meksiko
- Akane Nishimura, Asisten Program, Penilaian Dampak, GCF Task Force
- Pilar Saez Choquehuanca, GCF Task Force Peru dan Mekanisme Pembangunan Alternatif (Mecanismos de Desarrollo Alternos, MDA)

PEMBICARA:

- Rosa Olguita Celiz Cruz, Wakil Gubernur, San Martín, Peru
- Alejandro Mendez Lopez, Sekretaris Lingkungan Hidup, Michoacán, Meksiko
- Leonardo das Neves Carvalho, Sekretaris Lingkungan Hidup, Acre, Brasil
- Alex Sandro Antonio Marega, Sekretaris Eksekutif Bidang Lingkungan Hidup, Mato Grosso, Brasil
- Lina Peñuela, Koordinator, Dana Regional Amazon - UK PACT, Kedutaan Besar Inggris di Bogota
- Jorge Carillo, Penasihat Teknis, GiZ
- Angélica Narváez, Direktur - Pilar Bioekonomi, Alisos
- Guilherme Ponce, Pemimpin Program Penjangkauan, CDP
- Daniel Bedoya, Perwakilan Nasional untuk Kolombia, Panama, dan Venezuela, Dewan Pengelolaan Hutan (Forest Stewardship Council/FSC)

PESERTA:

- Stefan Lees, Direktur Pelaksana, Life Systems
- Jorge Vásquez, AICS Bogotá
- Fakhri Rhamadian Hidayat , Koordinasi Negara, GCF Task Force Indonesia
- Yarely Ortiz Guerrero, Koordinator Regional, Alisos
- Carlos Blandón , Kepala Program, FSC Indigenous Foundation
- Diego Pacheco, Pemerintah Caquetá, Kolombia
- Roberth Helder , Pemerintah Caquetá, Kolombia
- Henry Bloomfield, Direktur GCF Task Force Bolivia dan Asisten Direktur Teknis untuk Fundación Natura Bolivia



Regulasi dan komitmen internasional, terutama yang terkait dengan pasar bebas deforestasi, sedang membentuk kembali kondisi akses pasar untuk komoditas seperti kakao, kopi, daging sapi, kedelai, minyak sawit, karet, kayu, dan alpukat. Implementasi ketertelusuran berlangsung di tingkat lokal dan membutuhkan kapasitas lokal, interoperabilitas data, koordinasi nasional dan subnasional, partisipasi sektor swasta, dan mekanisme yang mencakup produsen skala kecil.

Regulasi semacam itu, termasuk Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (European Union Regulation on Deforestation-free Products, EUDR), merupakan peluang untuk merampingkan rantai produksi, memperkuat sistem informasi, membangun kepercayaan, dan menghubungkan produksi berkelanjutan dengan akses pasar. Namun, terdapat tantangan signifikan, karena ketertelusuran memerlukan penanganan isu-isu tata kelola, legalitas,

kepemilikan lahan, interoperabilitas sistem, akses konektivitas, kapasitas teknis, biaya kepatuhan, dan koordinasi antar tingkatan pemerintahan.

Sesi kerja ini merupakan kelanjutan dari webinar kesiapan EUDR kami yang diadakan pada bulan Maret dan Mei 2026.

Perspektif mitra

GiZ membagikan pengalaman mereka dari Inisiatif Tim Eropa tentang Rantai Nilai Bebas Deforestasi (TEI), yang mendukung negara-negara mitra dalam implementasi EUDR yang adil. Ketelusuran harus berpusat pada petani, berlandaskan kelembagaan, dan dibangun di atas infrastruktur bersama yang terbuka. Fondasi untuk Infrastruktur Publik Digital (DPI) global tanpa deforestasi sudah ada, tetapi kita membutuhkan keselarasan, tata kelola, dan skala.

CDP membahas keselarasan pelaporan perusahaan dan pemerintah dengan persyaratan EUDR, dengan mencatat bahwa uji tuntas bergantung pada pengumpulan informasi, identifikasi risiko, dan mitigasi. <https://www.cdp.net/api/file/cdp-policy-explainer-on-the-eu-deforestation-regulation>

Forest Stewardship Council (FSC) memperkenalkan perangkat sertifikasinya, yang diterima secara luas dan memiliki tingkat pengakuan konsumen global yang tinggi. Sertifikasi FSC berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk kepatuhan EUDR dengan beberapa persyaratan FSC (hak-hak MAKL dan Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (FPIC), hak-hak pekerja, dll.) yang melampaui persyaratan EUDR. Modul tambahan FSC opsional dapat membawa perusahaan sepenuhnya mematuhi EUDR.

Kebijakan, Pendekatan Sistemik, dan Kondisi yang Memungkinkan

Kedutaan Besar Inggris di Kolombia berbagi pelajaran yang dipetik dari program peternakan berkelanjutan dan rantai pasokan bebas deforestasi. Pesan utamanya adalah bahwa ketertelusuran tidak dapat dicapai hanya melalui teknologi atau kerja sama langsung dengan produsen; hal itu membutuhkan pendekatan sistemik yang melibatkan kebijakan publik, instrumen keuangan, bantuan teknis, konsumen, pusat penelitian, bank lokal, pengecer, dan distributor. Selain itu, peningkatan skala harus dikaitkan dengan keputusan kebijakan, insentif keuangan, permintaan pasar, serta protokol pemantauan, pelaporan, dan verifikasi. Persetujuan Undang-Undang Ketertelusuran Peternakan baru-baru ini disoroti sebagai peluang transformatif.

Contoh dari Kolombia

Alisos mempresentasikan pengalaman dari Roundtable Ketelusuran Kakao Nasional, yang terkait dengan Perjanjian Kakao Nol Deforestasi yang ditandatangani oleh Kolombia pada tahun 2017. Roundtable tersebut, yang mempertemukan para pelaku dari sektor publik, industri, produsen, eksportir, masyarakat sipil, dan kerja sama internasional, menghasilkan panduan legalitas, analisis peringatan deforestasi menggunakan informasi georeferensi, dan repositori

husus sektor yang dikelola oleh Federasi Nasional Petani Kakao. Disebutkan juga bahwa alat serupa juga ada untuk produksi kopi dan minyak sawit.

<https://legalitynavigator.efi.int/colombia-legality-due-diligence-tool-cocoa/>

<https://federaciondefeteros.org/>

<https://sica.federaciondefeteros.org/>

Kebutuhan Yurisdiksi di Peru

San Martín menyampaikan kekhawatiran tentang pendekatan terpusat dan menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak selalu berpartisipasi secara efektif dalam sistem nasional. Disebutkan juga bahwa pendanaan internasional untuk kementerian nasional tidak selalu sampai ke wilayah hukum atau menghasilkan hasil nyata di tingkat lokal. Anggota baru GCF Task Force, La Libertad, mempresentasikan visinya tentang ketertelusuran dan peningkatan nilai tambah, ekspor pertanian berkelanjutan yang didukung oleh bantuan teknis, bioteknologi, serta pengorganisasian dan penguatan petani kecil.

Sertifikasi sukarela dan tekanan pasar

Michoacán, Meksiko, menyajikan kasus produksi alpukat, sebuah rantai pasokan yang memberikan tekanan signifikan pada hutan awan dan hutan pinus-ek. Pemerintah negara bagian bekerja sama dengan LSM Guardian Forestal untuk mengembangkan sistem peringatan berbasis penginderaan jarak jauh dan sertifikasi sukarela (Pro-Forest Avocado). Meskipun Michoacán memiliki sumber daya yang tidak mencukupi dan kurangnya wewenang langsung untuk mengatur seluruh rantai pasokan, mereka berhasil mendapatkan sertifikasi untuk sekitar 90% ekspor, dengan mengandalkan tekanan pasar, aliansi dengan organisasi masyarakat sipil, dan perubahan preferensi konsumen AS.

Mengintegrasikan tata kelola dan data

Banyak persyaratan EUDR sudah dipenuhi berdasarkan Código Florestal, undang-undang tingkat nasional Brasil yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan hutan dan vegetasi asli secara berkelanjutan. Acre mempresentasikan strategi yang didasarkan pada dua pilar: Sistem Terpadu Lingkungan dan Perubahan Iklim (Sistema Integrado de Meio Ambiente e Mudanças do Clima, SIMAMC), yang menyatukan tujuh lembaga di bawah kerangka tata kelola tunggal, dan implementasi Green Seal (Selo Verde), sebuah sistem ketertelusuran yurisdiksi gratis. Alat ini mengintegrasikan data yang ada dari pemantauan deforestasi berbasis satelit, Registri Lingkungan Pedesaan (Cadastro Ambiental Rural, CAR), embargo lingkungan, dan informasi terkait kerja paksa untuk menghasilkan sertifikat kepatuhan lingkungan yang gratis dan dapat diverifikasi bagi para produsen. Salah satu tantangan yang tersisa adalah bagaimana mengurangi kesenjangan akses pasar bagi produsen kakao dan kopi kecil.

Meningkatkan Skala Komoditas Berkelanjutan

Mato Grosso, negara bagian penghasil pertanian terbesar di Brasil, menghadirkan contoh produksi skala besar sambil mengakui bahwa ketertelusuran harus ditangani berdasarkan produk dan rantai pasokan, karena tidak ada satu solusi pun yang akan berlaku untuk semua komoditas. Untuk mengatasi masalah skala dan ketertelusuran, Mato Grosso mengembangkan CAR Digital 2.0 dengan validasi otomatis dan referensi silang informasi georeferensi untuk secara signifikan mengurangi waktu pemrosesan registrasi. Negara bagian ini juga menciptakan Paspor Hijau (Passaporte Verde), yang dirancang untuk identifikasi dan pelacakan ternak individu di seluruh siklus produksi: kelahiran, transportasi, penggemukan, dan penyembelihan. Tujuannya adalah untuk menutup kesenjangan dengan pemasok tidak langsung, yang bertanggung jawab atas sebagian besar risiko deforestasi.

Hambatan

- Fragmentasi informasi antar entitas dan kurangnya interoperabilitas antara platform dan sistem pemantauan.
- Kurangnya interoperabilitas antar sistem dan tidak adanya metodologi umum mengenai geolokasi, definisi hutan, peringatan deforestasi, legalitas, dan uji tuntas.
- Koordinasi yang efektif antara pemerintah nasional dan pemerintah daerah masih terbatas.
- Kesenjangan dalam konektivitas, infrastruktur digital, dan kemampuan teknis di daerah produksi pedesaan.
- Biaya kepatuhan yang dapat mengecualikan produsen kecil atau memusatkan keuntungan pada pelaku besar dan terorganisir dengan lebih baik.
- Ketidakpastian hukum terkait tanah, pendaftaran tanah yang tidak lengkap, dan kesulitan dalam memvalidasi informasi properti.
- Kurangnya kesadaran atau perbedaan interpretasi terhadap persyaratan uji tuntas, dengan risiko bahwa setiap pembeli akan menerapkan format yang berbeda.
- Keterbatasan kemampuan pemberian sanksi atau pengendalian di wilayah-wilayah di mana perluasan produktivitas beririsan dengan ekonomi ilegal, perubahan penggunaan lahan, atau praktik penggundulan hutan di masa lalu.
- Kurangnya keterlibatan sektor keuangan teritorial dan konsumen dalam strategi ketertelusuran dan keberlanjutan.
- Risiko bahwa ketertelusuran akan dipahami semata-mata sebagai persyaratan komersial, tanpa mengintegrasikan hak, legalitas, komunitas, dan transformasi produktif.

Tindakan Prioritas

- Tetapkan peta jalan GCF Task Force untuk ketertelusuran dan produk bebas deforestasi, dengan membedakan kondisi pendukung, peran subnasional, dan persyaratan berdasarkan rantai produksi.

- Memposisikan GCF Task Force sebagai platform untuk bertukar solusi dan pelajaran yang didapat, misalnya Green Seal, Digital CAR, Green Passport, dan Guardian Florestal .
- Memperkuat interoperabilitas antar sistem informasi, termasuk data tentang properti, produsen, pemantauan hutan, legalitas, sertifikasi, embargo, dan ketertelusuran komersial.
- Mendorong diadakannya forum diskusi multi-pemangku kepentingan untuk setiap rantai produksi, dengan partisipasi dari produsen, pemerintah, asosiasi perdagangan, pembeli, lembaga kerja sama, masyarakat sipil, sektor keuangan, dan platform data.
- Mendorong pengembangan atau penguatan basis data subnasional yang dapat berinteraksi dengan sistem nasional dan memenuhi tuntutan internasional.
- Merancang mekanisme bantuan teknis untuk produsen kecil, dengan penekanan pada georeferensi, legalitas, penggunaan platform, regularisasi, dan praktik produksi berkelanjutan.
- Membuat atau mengadaptasi instrumen keuangan yang memungkinkan produsen untuk memenuhi persyaratan ketertelusuran, mengkonversi sistem produksi, dan mengakses sertifikasi atau laporan yang dapat diverifikasi.
- Mengembangkan pedoman umum untuk uji tuntas, legalitas, dan pemantauan, menghindari duplikasi persyaratan di antara pembeli dan mengurangi beban administratif.
- Memperkuat ketertelusuran pemasok tidak langsung dalam rantai yang kompleks, terutama peternakan sapi, di mana risikonya tidak terbatas pada pemasok langsung rumah potong hewan atau pembeli akhir.
- Pastikan bahwa ketertelusuran mencakup komponen sosial dan hak, bukan hanya verifikasi tidak adanya deforestasi.

b. Pendekatan Regeneratif: Ternak Sapi, Pertanian, dan Akses ke Pasar

MODERATOR:

- Rosa Maria Vidal, Penasihat Senior, GCF Task Force Meksiko
- Carlos Aragon, Direktur Negara Brasil GCF Task Force

PEMBICARA:

- Arturo Tovar, Kepala Pengembangan Bisnis Global dan Inisiatif Inovasi, LandScale , Rainforest Alliance
- Guilherme Ponce, Pemimpin Program Penjangkauan, CDP

- Lina Peñuela , Koordinator, Dana Regional Amazon - UK PACT, Kedutaan Besar Inggris di Bogota
- Juan Pablo Jaramillo, Sekretaris Lingkungan dan Pertanian, Departemen Caquetá, Kolombia
- Kaoma Martinez Romero, Sekretaris Pertanian dan Pembangunan Produktif, Departemen Vaupés, Kolombia
- Daniel Graf Pérez, Direktur Jenderal Sumber Daya Alam, Jalisco, Meksiko
- Albeiro Pachón Abril, Profesional, Sekretariat Pertanian dan Lingkungan, Departemen Guaviare, Kolombia
- Alex Sandro Antonio Marega , Sekretaris Eksekutif Bidang Lingkungan Hidup, Mato Grosso, Brasil
- Antero Martínez González, Manajer Regional Sumber Daya Alam, Piura, Peru
- Frank Eduardo Sánchez Romero, Manajer Regional Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah La Libertad, Peru

PESERTA:

- Kelly Johanna Castañeda Ruiz, Sekretaris Pertanian dan Lingkungan Hidup, Departemen Guaviare, Kolombia
- Alejandro Mendez Lopez, Sekretaris Lingkungan Hidup, Michoacán, Meksiko
- Fredrikke Burung bangau Kilander , Penasihat Senior, Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia - NORAD, Departemen Iklim, Alam dan Sektor Swasta - Seksi Kehutanan
- Borghild Tønnessen-Krokan , Penasihat Senior, Badan Kerjasama Pembangunan Norwegia - NORAD, Departemen Iklim, Alam dan Sektor Swasta - Bagian Kehutanan
- Vladimir Libreros , Koordinator Proyek, Aksi untuk Hutan
- Pilar Saez Choquehuanca, GCF Task Force Peru dan MDA
- Francisco Ruiz, TEFOS
- Diego Armando Jimenez, Universidad de las Américas
- Wilmer Silva Castro, Tim Konservasi Amazon
- Yarely Ortiz Guerrero, Koordinator Regional, Alisos
- Angélica Narváez, Direktur - Pilar Bioekonomi, Alisos
- Juliana de Moraes Pinheiro, Manajer Senior Kota, Negara dan Wilayah, CDP
- Jorge Carillo , Penasihat Teknis, GiZ
- Andrés Santana Bonilla, Manajer Senior, Pemberantasan Deforestasi Ilegal, Asosiasi Konservasi Amazon



Pendekatan regeneratif harus berkembang dari proyek percontohan dan ditingkatkan skalanya hingga mencakup kebijakan publik, mekanisme pasar, instrumen pembiayaan, sistem pengukuran yang dapat diverifikasi, dan strategi teritorial yang mampu menghasilkan keuntungan bagi produsen dan manfaat lingkungan yang terukur. Sesi tersebut mengidentifikasi hambatan yang terkait dengan pengukuran, pembiayaan, tata kelola, pasar, keberlanjutan kelembagaan, infrastruktur, kepemilikan lahan, akses ke teknologi, biaya sertifikasi, dan resistensi awal dari produsen. Pada saat yang sama, muncul peluang yang terkait dengan pen positioning produk bebas deforestasi, pasar yang terdiferensiasi, sistem jaminan partisipatif, sekolah lapangan, bioekonomi, biofuel, lanskap biokultural, restorasi produktif, pembayaran untuk jasa lingkungan, dan peningkatan minat sektor swasta dalam pendekatan lanskap.

Data sangat penting untuk kredibilitas pasar.

Rainforest Alliance mengidentifikasi tiga hambatan utama: metodologi yang tidak konsisten, jangka waktu yang panjang, dan tata kelola yang terfragmentasi. Platform LandScale, sebuah inisiatif dari Rainforest Alliance dan Conservation International, dipresentasikan sebagai opsi skala lanskap untuk mengatur data, memvalidasi informasi, dan mengkomunikasikan hasil secara kredibel kepada bisnis, investor, dan pemerintah. <https://www.landscape.org/>

CDP melengkapi pandangan ini dengan mencatat bahwa pasar mulai menghargai pendekatan yurisdiksi dan lanskap, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam membayar praktik yang tidak dapat diverifikasi. Partisipasi negara disajikan sebagai elemen yang memberikan legitimasi, mengurangi risiko greenwashing, dan memungkinkan perusahaan dan investor untuk

mempercayai hasil yang dilaporkan. Pengumpulan data sulit dan perusahaan perlu dapat mengukur Indikator Kinerja Utama (KPI).

Pengalaman Kolombia

Kedutaan Besar Inggris di Bogota berbagi pelajaran berharga dari pengalaman mereka dengan peternakan berkelanjutan dan regeneratif. Dicatat bahwa paket bantuan teknis harus disesuaikan dengan konteks lokal tertentu dan dengan partisipasi pemerintah subnasional. Dalam kasus peternak lokal, pelajaran kuncinya adalah perlunya perubahan perilaku. Produsen yang awalnya menunjukkan kemauan lebih besar untuk beradaptasi diprioritaskan, dengan hasil yang berfungsi sebagai bukti konsep. Potensi sistem jaminan partisipatif juga disorot, di mana masyarakat sendiri memverifikasi praktik baik dan membangun kepercayaan lokal.

Caquetá adalah salah satu wilayah penghasil ternak utama di Kolombia, dengan sekitar 2,5 juta ekor sapi. Pemerintah daerah telah mempromosikan inisiatif yang berfokus pada modernisasi, penguatan produsen kecil dan menengah, pembentukan perjanjian konservasi, pemanfaatan mesin pertanian, dan peningkatan kapasitas produksi. Pentingnya Undang-Undang Keterlacakan Ternak Kolombia disoroti sebagai alat untuk melacak asal usul hewan, pertumbuhannya, lahan tempat hewan tersebut dipelihara, dan apakah lahan tersebut mematuhi praktik bebas deforestasi. Namun, dicatat bahwa implementasinya harus mempertimbangkan realitas lokal seperti kepemilikan lahan informal, keberadaan Undang-Undang Dua (undang-undang yang melindungi ternak), area taman, dan keterbatasan infrastruktur jalan.

Departemen Pertanian dan Pengembangan Produktif Vaupés mengusulkan pendekatan berbasis komunitas yang didasarkan pada mendengarkan kebutuhan lokal, konservasi air, penilaian lahan pertanian tradisional (chagras), kesepakatan teknis dan budaya, praktik demonstrasi, layanan penyuluhan, sekolah transfer pengetahuan, dan partisipasi masyarakat, perempuan, pemuda, dan keluarga. Chagra adat adalah sistem pertanian regeneratif yang hidup, berdasarkan pengetahuan leluhur, pengelolaan wilayah secara budaya, siklus istirahat tanah, konservasi air, dan transmisi antar generasi. Chagra bukan hanya sebagai ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi yang kompatibel dengan konservasi dan bioekonomi. Pesan utamanya adalah bahwa keahlian teknis harus melengkapi pengetahuan tradisional tanpa menggantikannya.

Meskipun Guaviare masih memiliki hampir 70% tutupan hutan, wilayah ini menghadapi tekanan hebat dari peternakan sapi skala besar, perampasan lahan, jalan ilegal, dan konsentrasi lahan. Departemen terkait telah berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk tetap berada di wilayah mereka melalui kegiatan produktif berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab,

pengolahan produk, sistem agroforestri, perkebunan hutan, dan peternakan regeneratif. Masyarakat adat, Peraturan 4360, dan sertifikasi nol deforestasi merupakan jalur utama untuk mengakses pasar yang berbeda. Dicatat bahwa produsen skala kecil cenderung menerima dukungan kelembagaan yang lebih besar, tetapi pelaku besar dapat melakukan deforestasi ratusan hektar dan membalikkan kemajuan yang telah dicapai oleh banyak keluarga.

Pengalaman Jalisco: Sekolah Lapangan, Daging Bebas Deforestasi, dan Restorasi Produktif

Sebagian besar perubahan dan degradasi tutupan hutan di Jalisco terkait dengan peternakan, sehingga negara bagian tersebut mengembangkan Strategi Peternakan Berkelanjutan dengan empat garis aksi, termasuk daging sapi bebas deforestasi, sekolah lapangan, restorasi produktif, dan pengelolaan kebakaran. Sekolah lapangan berfungsi sebagai ruang belajar di mana para produsen di sekitarnya belajar tentang input hayati, peternakan regeneratif, pagar listrik, pengelolaan hutan terpadu, dan sistem agroforestri dan silvopastoral. Strategi ini telah membantu meluncurkan merek lokal, CaLibre, yang berfokus pada daging bebas deforestasi, dengan toko daging yang beroperasi dan kemitraan dengan hotel dan pasar perkotaan. Jalisco juga mempresentasikan strategi negara bagian untuk restorasi, pembayaran untuk jasa lingkungan melalui dana pendamping, dan lanskap biokultural sebagai instrumen konservasi yang tidak setara dengan kawasan lindung, tetapi relevan untuk pengelolaan lahan, diferensiasi produk, dan menghubungkan produksi dengan konservasi.

Intensifikasi berkelanjutan untuk mengurangi tekanan pada ekosistem hutan.

Mato Grosso, Brasil, produsen biji-bijian dan ternak utama, telah secara signifikan mengurangi deforestasi sekaligus meningkatkan produksi. Negara bagian ini berfokus pada biofuel, terutama etanol jagung, sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas tanpa memperluas lahan pertanian. Model ini mengintegrasikan kedelai, jagung, etanol, ampas penyulingan kering (DDG), minyak, bioelektrik, dan ternak. DDG, produk sampingan protein dari produksi etanol jagung, digunakan sebagai pakan ternak, memungkinkan intensifikasi peternakan, pengurangan lahan penggembalaan, dan mengurangi tekanan pada hutan.

Piura mempresentasikan strategi restorasi ekologis melalui empat proyek investasi publik dengan total lebih dari 30 juta soles, yang bertujuan untuk memulihkan jasa ekosistem, pengaturan air, dan tutupan vegetasi di daerah-daerah yang terdegradasi di bagian atas wilayah tersebut. Pembangunan bendungan tanah sebagai waduk komunitas untuk menampung air di daerah dataran tinggi menjadi sorotan, serta kerja sama langsung dengan masyarakat pedesaan.

Kerja sama antar-regional dalam bidang peternakan kambing regeneratif di Peru

Piura, Peru, berpartisipasi dalam Platform Hutan Kering Utara, yang terdiri dari wilayah Cajamarca (bukan anggota GCF Task Force), La Libertad, Lambayeque (pengamat), Piura, dan Tumbes. Kelompok ini memprioritaskan lima bidang utama dalam rencananya untuk mempromosikan peternakan kambing yang berkelanjutan dan regeneratif: penguatan basis produksi, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengembangan pasar dan pembiayaan, kapasitas organisasi dan koperasi, serta pemberdayaan tata kelola. Platform ini menyoroti peran pohon karob sebagai sumber daya utama untuk pakan kambing dan kebutuhan untuk memperkuat rantai nilai daging dan susu.

4. Kondisi Pendukung untuk Ekonomi Hutan Baru

a. Mengatasi Pelanggaran Hukum di Bidang Kehutanan: Menangani Akses terhadap Lahan, Tata Kelola yang Lebih Baik, Kolaborasi, dan Teknologi

MODERATOR:

- Juliana Monsalve Páez , Penasihat Iklim dan Hutan, Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia, Kolombia
- Marius von Essen, Peneliti Pasca Doktoral, UCLA

PEMBICARA:

- Diego Quintero, Kepala Divisi Kejahatan Terorganisasi, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) *bergabung secara virtual
- Felipe Botero Escobar, Direktur, Kantor Regional Andes, Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (GI-TOC)
- Mauricio Mira Pontón , Penasihat Kantor Walikota, Santiago de Cali, Kolombia
- Alcy Pinedo , Pengacara di Observatorium Konflik Sosial-Lingkungan, Yayasan Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan (Fundacion para la Conservacion y el Desarrollo Sostenible, FCDS), Kolombia
- Juliana Hurtado R., FCDS, Kolombia



Kejahatan terorganisir semakin mendorong deforestasi global. Penambangan emas ilegal, perampasan lahan, penebangan kayu, peternakan sapi, perdagangan narkoba dan satwa liar, serta pencucian uang beroperasi dalam jaringan yang saling terkait dan mengancam ekosistem hutan secara serius. Ekonomi ilegal membahayakan keamanan wilayah, tata kelola yang efektif, investasi berkelanjutan, mata pencaharian yang sah, dan keselamatan masyarakat adat dan lokal.

CONALDEF, sebuah contoh koordinasi antarlembaga di Kolombia.

Dewan Nasional Kolombia untuk Memerangi Deforestasi (Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación, CONALDEF) dipresentasikan sebagai badan koordinasi antarlembaga dengan kapasitas untuk mengkoordinasikan keadilan, keamanan, lingkungan, pemantauan, dan aksi teritorial dalam kemitraan dengan masyarakat setempat. Penggunaan teknologi, sistem informasi geografis, pelacakan satelit, dan analisis waktu nyata diidentifikasi sebagai komponen yang sangat diperlukan untuk memandu investigasi dan operasi. Namun, untuk mengurangi ketergantungan pada mobilisasi nasional, masih diperlukan peningkatan kapasitas lokal dan regional.

FCDS

Yayasan Konservasi dan Pembangunan Berkelanjutan (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS) membahas tantangan tata kelola, keamanan multidimensional, dan produksi informasi strategis untuk memerangi ekonomi ilegal di Amazon. Ditekankan bahwa ekonomi ilegal beroperasi secara terorganisir, sementara lembaga-lembaga cenderung merespons secara terfragmentasi. Tindakan prioritas meliputi mengatasi fragmentasi

kelembagaan melalui platform regional permanen, memperkuat kerja sama lintas batas, dan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk menghasilkan informasi strategis untuk pemantauan, pengendalian, penelitian, dan kebijakan publik.

FCDS menyajikan berbagai alat dan sumber daya seperti observatorium konflik lingkungan mereka (<https://observatorioamazonia.fcds.org.co/>) dan laporan “Amazonía dalam Sengketa” (Amazonía en Disputa). FCDS juga mengusulkan pertemuan virtual dengan anggota GCF Task Force untuk menjelaskan Forum Amazon tentang Keamanan Multidimensi dan untuk menjajaki kemungkinan kolaborasi.

Pentingnya alternatif ekonomi legal

Cali, ibu kota Valle del Cauca, Kolombia, berbagi pengalaman mereka dalam memerangi penambangan ilegal di Taman Alam Nasional Farallones de Cali, sebuah ekosistem strategis untuk pasokan air kota dan wilayah tersebut. Kasus ini menunjukkan pentingnya menggabungkan langkah-langkah penegakan hukum, teknologi, pembayaran untuk jasa lingkungan (payments for environmental services, PES) dan bisnis ramah lingkungan, serta kolaborasi dengan pemerintah nasional. Untuk bersaing dengan ekonomi ilegal, Cali meningkatkan PES dan pembayaran untuk bisnis ramah lingkungan bagi petani dan masyarakat di zona penyangga dan mempekerjakan mantan penambang ilegal sebagai penjaga taman dan penjaga hutan. Ada juga peluang untuk menghubungkan sektor swasta melalui insentif pajak untuk investasi dalam konservasi.

Kemitraan baru

GCF Task Force dan Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, GI-TOC), sebagai Sekretariat Teknis Kota dan Wilayah Bersatu untuk Keanekaragaman Hayati: Koalisi Melawan Ekonomi Ilegal, mengakhiri sesi kerja dengan menandatangani Surat Pernyataan Niat (LOI) yang bertujuan untuk melindungi hutan dan meningkatkan akses data untuk memerangi kejahatan hutan. Tindakan prioritas meliputi pembuatan rencana kerja bersama untuk pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas, dan posisi politik pemerintah subnasional; mengidentifikasi yurisdiksi GCF Task Force yang paling terpapar penambangan ilegal, penebangan ilegal, perampasan lahan, perdagangan satwa liar, dan ekonomi ilegal yang terkait dengan deforestasi; dan menciptakan mekanisme kerja sama teknis untuk membantu pemerintah subnasional lebih memahami peran mereka dalam memerangi kejahatan terorganisasi lingkungan.

Tindakan Prioritas

- Mengakui ilegalitas sebagai kondisi penting yang memungkinkan terjadinya kejahatan dan merumuskan peta jalan GCF Task Force tentang kejahatan terorganisir di bidang lingkungan.

- Memetakan titik-titik rawan, memperkuat ketelusuran emas, mengejar struktur kriminal dan aliran keuangan.
- Memperkuat interoperabilitas, pos komando terpadu, kelompok kerja regional, dan kapasitas lokal.
- Selidiki pembagian lahan ilegal, pembukaan jalan, perampasan lahan, dan penjualan lahan ilegal.
- Mengubah pemantauan satelit, geoviewer, dan peringatan menjadi keputusan untuk pengendalian, yudisialisasi, dan regulasi.
- Memperkuat Forum Amazon tentang Keamanan Multidimensi dan menghubungkan pemerintah subnasional dari GCF Task Force.
- Meningkatkan pembayaran untuk jasa lingkungan, bisnis hijau, bioekonomi, dan konversi kembali pelaku lokal.
- Terapkan sensor, jebakan kamera, citra satelit, dan panel kontrol bersama.

b. Menghubungkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK atau NTFP) dari Amazon ke Pasifik

MODERATOR:

- Francisco Ruiz, Program TEFOS-UK
- Fernando Ramírez, Program TEFOS-UK

PEMBICARA:

- Viviana Obando, Manajer, RAP Pacífico
- Paola Pulido, Kedutaan Besar Inggris, Kolombia
- Carla Portillo, Kementerian Perdagangan, Sains, dan Teknologi, Kolombia
- Isabel González, Asosiasi Wanita Ayakuná dan Komite Buah Amazon Caquetá,
- Analiz Santos, Spesialis Senior Bidang Hukum dan Kepatuhan Hukum, Amanatari
- Oseas Barbaran Sánchez, Presiden, Konfederasi de Nacionalidades Amazónicas del Perú - CONAP
- José Mattos, Direktur Eksekutif, Viafloresta
- Vladimir Saguma Acha, Koordinator Tata Kelola. Proyek Hutan Kering, PROFONANPE

HHBK menghadirkan peluang untuk memperkuat mata pencaharian yang legal, berkelanjutan, dan relevan secara budaya, dengan syarat hambatan regulasi dan keuangan yang dihadapi masyarakat dapat diatasi.

Untuk memajukan praktik bioekonomi berkelanjutan, kerangka peraturan untuk HHBK harus ditinjau dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama. Ini termasuk

menerapkan proses partisipatif seperti kunjungan wilayah yang dipimpin oleh otoritas, lokakarya komunitas, dan perjanjian yang dapat diverifikasi, sekaligus mengurangi biaya perizinan, menyederhanakan prosedur, dan menciptakan jalur bagi masyarakat adat dan lokal dengan praktik berkelanjutan yang telah terbukti. Selain itu, upaya harus difokuskan pada pembangunan kapasitas masyarakat, pengembangan mekanisme keuangan yang fleksibel, mendorong pertukaran pengetahuan regional, memastikan partisipasi inklusif, dan menyelaraskan strategi bioekonomi dengan pencegahan deforestasi, restorasi ekosistem, keamanan wilayah, dan pengurangan ekonomi ilegal. Yang penting, Koalisi Investor Amazon menawarkan dukungannya untuk proses pertukaran teknis dan koordinasi dengan organisasi masyarakat adat Pan-Amazon.

Produk Hutan Non-Kayu dan hambatan regulasi di Kolombia

Ayakuná, sebuah asosiasi pengusaha perempuan, dan Komite Buah-buahan Amazon mempresentasikan pengalaman sebuah organisasi komunitas di Belén de los Andaquíes, Caquetá, Kolombia. Belén de los Andaquíes memiliki salah satu tingkat deforestasi terendah di Caquetá, dan pengalaman Ayakuná menggambarkan hubungan langsung antara konservasi, mata pencaharian yang sah, kepemimpinan perempuan pedesaan, dan pelestarian hutan yang masih berdiri. Namun, terdapat hambatan regulasi, teknis, dan finansial yang signifikan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bioekonomi. Regulasi yang dirancang untuk melindungi sumber daya genetik dari biopiracy telah mendorong komersialisasi berbasis komunitas, dan ada kebutuhan untuk membedakan proses komunitas dari dinamika ekstraksi skala besar. Ada juga kebutuhan untuk mengurangi biaya izin penebangan dan menyederhanakan jalur bagi organisasi komunitas, terutama ketika ada bukti pengelolaan yang berkelanjutan.

Mengatasi kesenjangan antara peraturan dan realitas teritorial di Loreto, Peru

Amanatari, sebuah LSM Peru, mempresentasikan pekerjaannya dengan masyarakat di Loreto, khususnya pengalaman masyarakat Sucusari dalam penggunaan aguaje dan serat aguaje untuk produksi kerajinan tangan. Di Peru, Dinas Kehutanan dan Satwa Liar Nasional menetapkan pedoman teknis untuk penggunaan HHBK, sementara pemerintah daerah memberikan izin. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara persyaratan yang ditetapkan oleh standar dan kondisi aktual masyarakat di wilayah tersebut. Formulir dan persyaratannya rumit bagi masyarakat, dan biaya prosesnya dapat mencapai sekitar USD 10.000.

Masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang praktik berkelanjutan dan sistem pengelolaan yang mapan, dan harus dikonsultasikan sebelum pedoman dimodifikasi. Amanatari menyelenggarakan kunjungan oleh pihak berwenang ke komunitas Sucusari pada Maret 2026, yang menghasilkan pembentukan rencana kerja untuk memperbarui pedoman pada bulan Agustus.

CONAP dan komunitas adat di Amazon Peru

CONAP mewakili sekitar 1000 komunitas adat di Amazon Peru. Mereka menekankan bahwa ekonomi masyarakat adat harus meningkatkan kualitas hidup, sementara biobisnis harus mengakui budaya, pengetahuan tradisional, dan otonomi organisasi masyarakat adat. Kepemilikan tanah dan jaminan kepemilikan tetap menjadi syarat mendasar untuk pengelolaan wilayah dan partisipasi efektif dalam bioekonomi.

Tindakan prioritas yang direkomendasikan meliputi:

- Sederhanakan proses administratif untuk perizinan, pembiayaan, dan bantuan teknis.
- Memperkuat asosiasi dan usaha yang dipimpin oleh perempuan adat, karena mereka merupakan aktor sentral dalam menghasilkan pendapatan, terutama melalui kerajinan tangan, serat, tanaman obat, dan hasil hutan non-kayu lainnya.
- Memperkuat ruang untuk partisipasi efektif dalam bidang politik.
- Membangun agenda regional di antara masyarakat adat, komunitas lokal, pemerintah subnasional, pemerintah nasional, dan lembaga kerja sama internasional.

Bioekonomi di Brasil – dari kebijakan publik hingga implementasi

Koalisi Investor Amazon menyoroti pengalaman bioekonomi Brasil dan menekankan bahwa bioekonomi tidak berasal dari minat pasar yang baru-baru ini muncul, tetapi terkait erat dengan praktik komunitas dan masyarakat adat. Pentingnya penetapan batas dan pengakuan wilayah, peraturan tentang akses terhadap warisan genetik dan pembagian manfaat, serta kebutuhan akan ketertelusuran untuk memastikan bahwa manfaat sampai kepada komunitas yang menyediakan sumber daya, juga dicatat.

Ada kebutuhan untuk memperkuat pendidikan keuangan, kewirausahaan, dan hukum bagi masyarakat adat dan tradisional; untuk berinvestasi dalam infrastruktur bioekonomi; untuk mengembangkan mekanisme pembiayaan campuran yang menggabungkan modal filantropi, sumber daya publik, modal alam, dan inisiatif pemerintah; dan untuk mempromosikan dialog lintas wilayah antara semua aktor.

Profonanpe dan Proyek Hutan Kering: Tata Kelola Multitingkat dan Multiaktor di Komunitas Petani

Proyek Hutan Kering dipresentasikan sebagai peluang bioekonomi di luar Amazon. Hutan kering Peru terkonsentrasi di departemen Lambayeque, Piura, dan anggota baru GCF Task Force, La Libertad dan Tumbes. Tata kelola multilevel dan multi-pemangku kepentingan sangat penting untuk proses pembangunan teritorial yang berkelanjutan.

Prioritas yang diidentifikasi meliputi penguatan komite teknis teritorial yang terkait dengan hutan kering, peternakan kambing, peternakan lebah, pohon karob, dan rantai produksi lainnya; koordinasi lembaga-lembaga yang sudah bekerja di wilayah tersebut (misalnya CARE Peru, PROCAP, dan perusahaan agroindustri dan hidrobiologi yang tertarik pada restorasi dan

pengelolaan berkelanjutan); peningkatan kerja sama regional dengan merancang agenda bersama (misalnya Platform Hutan Peru Utara); dan pengembangan kapasitas advokasi politik di masyarakat dan aktor teritorial.

5. Pemulihan dan Ketahanan

a. Manajemen Kebakaran Terpadu: Dari Amazon hingga California

MODERATOR:

- Francisco Ruiz, Direktur Eksekutif, Action for Forest
- Iván Fernández, Koordinator FIIAPP Amazonía +

PEMBICARA:

- Marisol Yabeta Azaeda , Sekretaris Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Santa Cruz, Bolivia
- Marcos Bauch , Koordinator Proyek - Pusat Manajemen Kebakaran Global, Organisasi Pangan dan Pertanian - Perserikatan Bangsa-Bangsa - FAO
- Hugo Carvajal, Pakar Tata Kelola Hutan untuk Amazonía +, Expertise France
- Encarnación Porras, Konsultan Amazonia +, FIIAPP
- Vladimir Libreros , Koordinator Proyek, Aksi untuk Hutan
- Daniel Melling, Kepala Pemasaran, CTrees
- Fabiano Silva, Konsultan, Konservasi XLabs



Sesi kerja tersebut menekankan perlunya pergeseran mendesak dari respons kebakaran hutan yang reaktif dan berfokus pada pemadaman ke model tata kelola sistemik dan proaktif untuk Pengelolaan Kebakaran Terpadu (IFM) di Amazon. Karena variabilitas iklim—terutama peristiwa El Niño yang parah—memperpanjang musim kebakaran dan meningkatkan risiko ekologis di seluruh Amerika Latin, para peserta menyoroti bahwa pengelolaan kebakaran bukan lagi sekadar masalah respons darurat, tetapi merupakan komponen penting dari perencanaan penggunaan lahan, tata kelola wilayah, dan ketahanan iklim.

Para pemangku kepentingan utama dari pemerintah subnasional, masyarakat adat, dan lembaga teknis internasional (FAO, CTREES, Conservation X Labs) mencatat bahwa meskipun proyek percontohan dan praktik terbaik lokal telah ada, tantangan utamanya adalah melembagakan upaya-upaya ini ke dalam kebijakan publik permanen. Sesi tersebut menggarisbawahi peran penting pemerintah subnasional sebagai jembatan antara kerangka kerja nasional dan implementasi di lapangan. Dengan mengintegrasikan pengetahuan leluhur dengan alat teknologi modern (seperti pemantauan berbasis satelit dan pemetaan bahan bakar), entitas subnasional dapat mengubah kebakaran dari ancaman menjadi elemen yang dapat dikelola untuk kesehatan wilayah. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa untuk mencapai hal ini diperlukan peralihan dari pendanaan berbasis proyek yang terfragmentasi menuju aliansi multi-pemangku kepentingan yang berkelanjutan yang memprioritaskan pencegahan, peningkatan kapasitas, dan kerja sama regional.

CTrees

CTrees adalah organisasi nirlaba yang berbasis di California yang telah memetakan biomassa di setiap hektar lahan di Bumi. Mereka memiliki beberapa kumpulan data yang tersedia sebagai sumber daya terbuka, termasuk Land Use Change Alerts (LUCA), yang mendeteksi perubahan di hutan akibat kebakaran atau deforestasi dan degradasi setiap beberapa minggu. Di luar sains, penelitian, dan pengembangan data, CTrees berfokus pada solusi berbasis alam, seperti penilaian REDD+ yurisdiksional.

Baru-baru ini, mereka juga memfokuskan perhatian pada pencegahan kebakaran dengan tiga aspek: pemetaan bahan bakar (vegetasi hidup dan mati), pemantauan kelembaban, dan pemodelan perilaku kebakaran berdasarkan hasil pemetaan bahan bakar dan kelembaban.

Laboratorium Konservasi X (Conservation X Labs, CXL)

Dana investasi baru CXL yang disebut South America Fire Fund akan membiayai tindakan pencegahan kebakaran dan tata kelola yang tangguh di area prioritas Amazon, Pantanal, dan Chiquitania di Brasil, Bolivia, dan Peru. Tujuan dana ini adalah untuk memverifikasi efektivitas serangkaian tindakan sistemik di kota-kota fokus tersebut. Tujuan utama selama tiga tahun adalah untuk membuktikan bahwa dimungkinkan untuk meningkatkan dinamika kebakaran

hutan dengan sumbangan filantropis dan koordinasi dengan pemerintah kota, negara bagian, dan federal.

Santa Cruz, Bolivia

Sebagai respons terhadap kebakaran dahsyat pada tahun 2024, departemen Santa Cruz membentuk Layanan Departemen untuk Manajemen Kebakaran Terpadu – yang pertama di negara ini. Selain pengurangan bahan bakar dan manajemen pencegahan kebakaran lainnya, mereka menyediakan pelatihan teknis, peralatan strategis, dan alat tanggap pertama untuk memperkuat kapasitas operasional masyarakat jika terjadi keadaan darurat. Mereka juga mendirikan Pusat Pemantauan Komprehensif dan sistem peringatan dini.

Hambatan:

Para peserta mengidentifikasi beberapa kendala berulang yang menghambat implementasi IFM secara efektif di wilayah Amazon:

- **Fragmentasi Kelembagaan:** Terdapat kesenjangan yang mencolok antara kerangka kebijakan nasional dan implementasi di tingkat subnasional. Banyak pemerintah subnasional kurang mengintegrasikan IFM secara formal ke dalam kebijakan publik tetap mereka, dan lebih mengandalkan dukungan sporadis dan spesifik proyek.
- **Model Pendanaan Reaktif:** Sumber daya keuangan sebagian besar terikat pada siklus respons darurat. Pendanaan biasanya baru tiba ketika kebakaran sedang terjadi, sehingga mencegah alokasi anggaran berkelanjutan untuk pencegahan jangka panjang, peningkatan kapasitas, dan pemeliharaan peralatan.
- **Ketidakefisienan Operasional:** Brigade relawan berbasis komunitas, yang seringkali menjadi penanggap pertama, beroperasi dalam kondisi buruk dan kekurangan sumber daya penting seperti transportasi, peralatan komunikasi, dan pelatihan khusus.
- **Penurunan Nilai Pengetahuan Tradisional:** Masih terdapat penilaian rendah secara sistematis terhadap praktik-praktik penggunaan api leluhur, yang seringkali hanya dipandang sebagai risiko dan bukan sebagai alat strategis untuk pengelolaan lanskap dan pemeliharaan pertanian.
- **Kesenjangan Data dan Informasi:** Meskipun data dihasilkan di tingkat lokal, data tersebut tetap tersebar dan sulit diakses. Terdapat kekurangan sistem terpusat, terstandarisasi, dan mudah digunakan untuk mengubah data mentah ini menjadi alat pengambilan keputusan yang dapat ditindaklanjuti bagi administrator lokal.

Tindakan Prioritas

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, sesi tersebut menyoroti beberapa tindakan penting bagi pemerintah subnasional dan regional:

- **Institusionalisasi Kebijakan IFM:** Pemerintah harus melangkah lebih jauh dari program percontohan dengan menciptakan unit atau layanan khusus (misalnya, "Layanan

Departemen untuk Manajemen Kebakaran Terpadu") dalam struktur administratif mereka untuk memastikan keberlanjutan di luar siklus politik dan untuk mengalihkan fokus ke pencegahan, bukan hanya tanggap darurat.

- Memperkuat Brigade yang Dipimpin Masyarakat: Ada kebutuhan mendesak untuk memformalkan dan melengkapi brigade sukarelawan lokal dengan pendanaan tetap, teknologi yang sesuai (drone, pompa air), dan pelatihan teknis berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas operasional.
- Meningkatkan pendanaan operasional dan memperbaiki keberlanjutan keuangan.
- Meningkatkan Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Mengembangkan dan mengadopsi pusat pemantauan canggih yang menyediakan peringatan kebakaran hampir secara real-time dan pemodelan prediktif (seperti sistem yang dibahas oleh CTREES) sangat penting untuk manajemen proaktif daripada reaktif.
- Koordinasi Horizontal dan Vertikal: Memfasilitasi dialog berkelanjutan antara yurisdiksi tetangga, pemerintah nasional, dan lembaga internasional diperlukan untuk menyederhanakan proses birokrasi dan menyelaraskan terminologi, pelatihan, dan protokol respons.
- Mengintegrasikan pengetahuan leluhur dan masyarakat adat: Mempromosikan pertukaran antarbudaya dan melibatkan masyarakat adat sebagai pemangku kepentingan utama dan pengambil keputusan dalam tata kelola api sangat penting untuk memulihkan "budaya api" dan memanfaatkan strategi pengelolaan leluhur.

Peluang yang Muncul

Terlepas dari tantangan yang ada, sesi ini mengidentifikasi jalur yang menjanjikan untuk memajukan IFM:

- Jaringan dan Perjanjian Regional: Inisiatif seperti Jaringan Amazon untuk Pengelolaan Kebakaran Terpadu (Red Amazónica de Manejo Integral del Fuego, RAMIF) dari Organisasi Perjanjian Kerja Sama Amazon menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk saling membantu, pertukaran pengetahuan, dan perluasan pengalaman sukses lintas batas. RAMIF baru-baru ini menyelenggarakan ExpoMIF, sebuah acara untuk berbagi praktik terbaik tentang Pengelolaan Kebakaran Terpadu di Amazon. Pertukaran tersebut menghasilkan puluhan perjanjian sukarela dan 54 praktik dan pengalaman terbaik, yang dapat ditemukan di <https://www.expomif.org/>
- Inovasi Teknologi: Kemitraan dengan organisasi ilmiah dan pusat teknologi (misalnya, CTREES, Conservation X Labs) menawarkan alat baru untuk pemetaan bahan bakar 3D, pemantauan kelembaban, dan prediksi perilaku kebakaran berbasis fisika, memungkinkan intervensi pencegahan yang lebih tepat.
- Investasi Filantropi dan Internasional: Peluncuran dana khusus, seperti Conservation X Labs South America Fire Fund, menunjukkan meningkatnya minat dari filantropi internasional untuk menggeser insentif dari penanggulangan ke pencegahan dan tata kelola yang tangguh.

- Contoh Kisah Sukses: Pengalaman Santa Cruz, Bolivia, menjadi model berdampak tinggi bagi yurisdiksi lain, menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan departemen yang komprehensif dan sistem peringatan dini dapat menyebabkan pengurangan signifikan pada area yang terdampak, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang.
- Tata Kelola Wilayah yang Inklusif: Terdapat peningkatan pengakuan terhadap peran perempuan dan pemimpin adat dalam pengelolaan kebakaran, yang memberikan peluang untuk membangun tatanan sosial yang lebih tangguh dengan mengintegrasikan beragam perspektif lokal ke dalam struktur tata kelola formal. Lihat inisiatif Fundación Amigos de la Naturaleza di <https://www.fan-bo.org/index.php/que-hacemos/comunidades-y-ciudades-resilientes>

b. Restorasi Ekosistem: Studi Kasus, Tantangan, dan Jalur Menuju Skala yang Lebih Besar

MODERATOR:

- Syahrina D. Anggraini , Direktur GCF Task Force Indonesia
- Fakhri Rhamadian Hidayat , Koordinasi Negara, GCF Task Force Indonesia

PEMBICARA:

- Hairil Anwar, Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kalimantan Barat, Indonesia
- Magdalena Torres Abarca, Sekretaris Lingkungan dan Sejarah Alam, Negara Bagian Chiapas, Meksiko
- Nasly Fernanda Vidales González, Subsekretaria de Proyectos de Sostenibilidad Ambiental, Departemen Valle del Cauca, Kolombia
- Julio Cesar Benites, Manajer Regional Pembangunan Ekonomi, Tumbes, Peru
- Andres Zuluaga , Direktur Konservasi untuk Wilayah NASCA, The Nature Conservancy (TNC)
- Blanca Lucía Echeverry, Koordinator Nasional, IRI Kolombia, Inisiatif Hutan Hujan Antaragama

PESERTA:

- Marcello Lelis, Sekretaris Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, dan Iklim, Tocantins, Brasil
- Francisca Arara, Sekretaris Khusus untuk Masyarakat Adat - SEPI, Acre, Brasil
- Jaksilande Araújo de Lima, Presiden Institut Perubahan Iklim (IMC), Acre, Brasil
- Estiko Wiradyo, Kepala Divisi Perencanaan, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Papua, Indonesia

- Neyra Silva Rosado, Sekretaris Pembangunan Berkelanjutan, Negara Bagian Yucatán, Meksiko
- Daniel Graf Pérez, Direktur Jenderal Sumber Daya Alam, Jalisco, Meksiko
- Jimmy Walter Susanto, Kepala Departemen Kehutanan, Papua Barat, Indonesia
- Luis Giovanni Santos González, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Tabasco, Meksiko
- Diogo Martins Rosa, Direktur Tata Kelola Iklim, SEDAM, Rondônia, Brasil
- Maria Beatriz Saldanha, Konsultan, Environmental Defense Fund - EDF
- Luciana Carrijo, Spesialis Proyek - Lingkungan dan Perubahan Iklim, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa - UNDP
- Willinton Murillo Quinto, Ketua Tim COCOMACIA REDD+, Terra Global Capital
- Nicia Coutinho, Direktur untuk Brasil - ICGT, Forest Trends



Restorasi tidak hanya melibatkan pemulihan tutupan vegetasi, tetapi juga membangun kembali fungsi ekologis, memperkuat mata pencaharian, mengurangi tekanan pada hutan dan lahan basah, memobilisasi pendanaan, mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dan lokal, serta membangun kapasitas masyarakat jangka panjang. Sesi ini mengidentifikasi kesenjangan yang berulang: pendanaan yang tidak mencukupi, kesulitan pemantauan, kebutuhan akan validasi lapangan, koordinasi yang terbatas antar tingkatan pemerintahan, kesenjangan regulasi, ketergantungan pada kerja sama eksternal, dan kebutuhan akan instrumen kebijakan publik yang berkelanjutan.

Restorasi: Lebih dari Sekadar Intervensi Teknis.

The Nature Conservancy (TNC) menyajikan restorasi sebagai komponen sentral dari solusi iklim berbasis alam. Pendekatan konservasi dan restorasi yang ketat di lanskap produktif tidak boleh dilihat sebagai kekuatan yang berlawanan, melainkan sebagai pelengkap. Strategi iklim

yurisdiksional harus mengintegrasikan restorasi hutan, pencegahan deforestasi, dan agroforestri, dengan area prioritas yang diidentifikasi berdasarkan efektivitas biaya.

Inisiatif Hutan Tropis Antar Agama menekankan bahwa restorasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai intervensi teknis. Restorasi membutuhkan kepercayaan, legitimasi sosial, kepemimpinan komunitas, dialog antar berbagai bentuk pengetahuan, dan pembelaan hak-hak. Tindakan prioritas mereka meliputi penguatan jaringan komunitas dan keagamaan; mempromosikan proses komunikasi teritorial; melibatkan masyarakat adat, perempuan, pemuda, pemimpin sosial, dan pemerintah daerah; serta menjadikan restorasi sebagai tanggung jawab bersama.

Pengalaman yurisdiksional

Tumbes, Peru, mempresentasikan sebuah proyek yang berfokus pada pembuatan peta menggunakan citra satelit untuk mengidentifikasi area yang terdegradasi dan memandu proyek restorasi ekologis. Diperlukan data geografis, ekologis, dan lapangan untuk memprioritaskan pengambilan keputusan.

Cauca, Kolombia, memiliki rencana pengembangan kehutanan yang mencakup penyelarasan perencanaan lingkungan, pengelolaan daerah aliran sungai, dan bioekonomi; mempromosikan penebangan legal dan ketelusuran kayu; mengkarakterisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); dan mempromosikan insentif untuk konservasi dan kompensasi lingkungan.

Kalimantan Barat, Indonesia, membagikan strategi restorasi lahan gambut mereka, yang terstruktur di sekitar tiga komponen: pembasahan kembali, revegetasi, dan revitalisasi ekonomi. Alur kerjanya meliputi implementasi infrastruktur pembasahan kembali; pembangunan pembibitan; revegetasi area yang terbakar atau terdegradasi; promosi spesies serbaguna; pengaturan penggunaan lokal; dan dukungan kepada masyarakat dengan modal, pelatihan, dan mata pencaharian alternatif. Dicatat bahwa terdapat kesamaan antara hutan tropis Kalimantan dan Caquetá.

Chiapas, Meksiko, mempresentasikan program restorasi dan pembersihan daerah aliran sungai mikro mereka. Inisiatif ini mencakup konservasi tanah dan air, pembuatan teras, pembatas alami, reboisasi, jalur pencegah kebakaran, kompor hemat bahan bakar, dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Sumber daya publik negara diinvestasikan dalam daerah aliran sungai mikro, dan anggota ejido (lahan pertanian komunitas) serta masyarakat dibayar untuk pekerjaan restorasi.

Kesimpulan dan Langkah Selanjutnya

Prioritas langkah selanjutnya:

- **Buat peta jalan GCF Task Force untuk:**
 - **Ketertelusuran/komoditas bebas deforestasi**
 - **Kejahatan terorganisir lingkungan**
 - **Fasilitas bioekonomi regional**
- **Mendorong berbagi dan pertukaran pengetahuan:** Memposisikan GCF Task Force sebagai platform/repositori pusat untuk alat sumber terbuka (misalnya, Green Seal, Digital CAR, Green Passport) dan praktik terbaik teknis. Mendorong pertukaran antarbudaya dan pertukaran teknis di dalam dan antar yurisdiksi.
- **Perluas mekanisme pembiayaan langsung dan fleksibel:** Jelajahi struktur yang ditargetkan, seperti dana bergulir GCF Task Force, untuk menutupi biaya kesiapan, verifikasi, dan transisi bagi petani kecil.
- **Meningkatkan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas:** Memberikan dukungan khusus kepada produsen kecil terkait georeferensi, regularisasi lahan, dan adopsi platform untuk mencegah pengucilan pasar.
- **Mengatasi fragmentasi kelembagaan dan ketidakstabilan politik:** Mendorong dialog dan keselarasan antara semua tingkatan pemerintahan, MAKL, dan pemangku kepentingan lainnya. Melembagakan kebijakan untuk memastikan keberlanjutan di luar siklus politik.

Sesi kerja ini menunjukkan bahwa pemerintah subnasional dan para pemimpin masyarakat secara aktif mendorong kerangka kerja praktis untuk membangun Ekonomi Hutan Baru. Untuk mempertahankan momentum ke depan, GCF Task Force sekarang harus memanfaatkan jaringannya untuk menyelaraskan sistem yang terfragmentasi, mengamankan akses yang adil terhadap pendanaan, dan memastikan bahwa standar keberlanjutan yang ketat melindungi petani kecil dan masyarakat adat. Selain itu, GCF Task Force akan mengurangi ketidakstabilan politik dengan memberikan kesinambungan dengan gubernur yang baru terpilih dan pegawai negeri sipil yang baru diangkat pada tahun dengan pergantian politik yang tinggi ini. Bersama dengan sembilan yurisdiksi anggota baru kami, kami akan melanjutkan pekerjaan membangun Ekonomi Hutan Baru.